

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer, yang diperoleh dengan melalui penyebaran kuesioner secara langsung oleh peneliti kepada SKPD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kuesioner disebarakan kepada SKPD yang terdiri dari 4 badan, 1 inspektorat, 19 dinas, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 kantor, dan 4 kecamatan. Masing-masing SKPD tersebut menerima 4 buah kuesioner. Kuesioner yang disebarakan kepada responden adalah sejumlah 120 kuesioner, di mana jumlah kuesioner yang kembali adalah sejumlah 109 kuesioner, terdapat 11 kuesioner yang tidak kembali, serta terdapat 13 kuesioner yang tidak dapat diolah karena tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kriteria. Dengan demikian, maka jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sejumlah 96 kuesioner. Pengumpulan data tersebut dilakukan mulai tanggal 26 September 2018 – 12 Oktober 2018. Adapun tingkat pengembalian kuesioner disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Analisis Pengembalian Kuesioner

| Keterangan | Jumlah |
|--|----------------|
| Total penyebaran kuesioner | 120 |
| Jumlah kuesioner yang tidak kembali | 11 |
| Jumlah kuesioner yang kembali | 109 |
| Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah / tidak lengkap | 13 |
| Jumlah kuesioner yang dapat diolah | 96 |
| Tingkat pengembalian kuesioner | 90,83 % |

Sumber: Data kuesioner penelitian

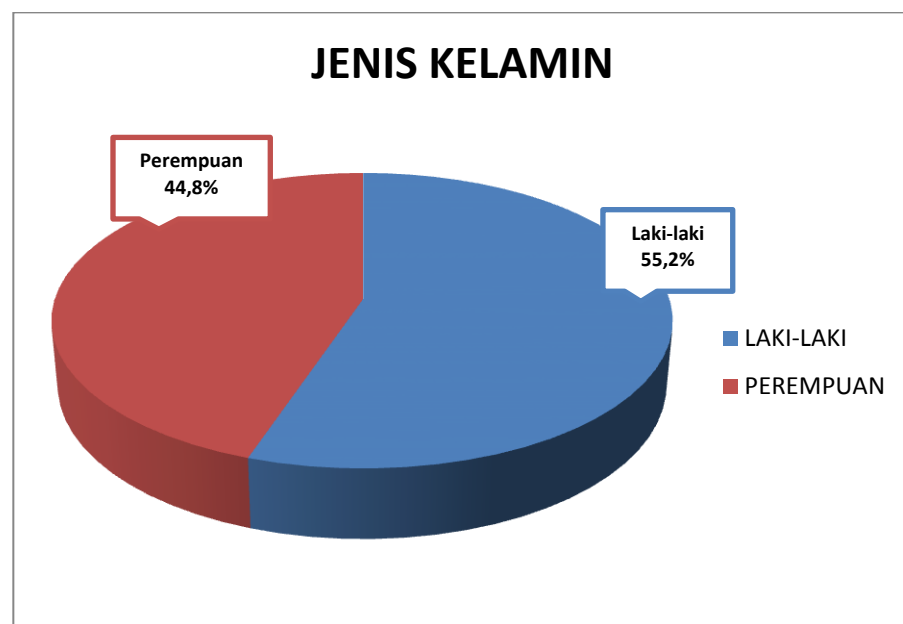
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa total kuesioner yang dibagikan kepada responden adalah sejumlah 120 kuesioner. Tingkat dari pengembalian kuesioner adalah sebesar 90,83% atau sebanyak 109 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang kembali tersebut, terdapat 13 kuesioner yang tidak dapat diolah / tidak lengkap. Dengan demikian, maka kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini adalah sejumlah 96 kuesioner.

2. Demografi Obyek Penelitian

Obyek penelitian diklasifikasikan berdasarkan identitas responden, yang meliputi usia responden, jenis kelamin responden, jabatan responden, pendidikan terakhir responden, serta lama bekerja responden. Adapun hasil klasifikasi tersebut adalah:

a. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil dari klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam diagram di bawah ini :



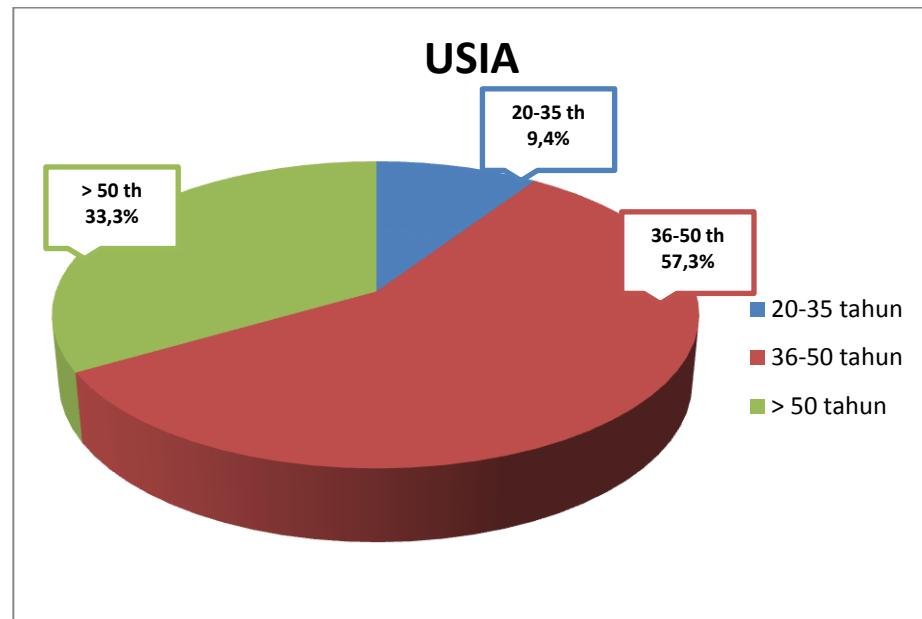
Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Gambar 4.1
Presentase Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini terdapat 55,2% responden berjenis kelamin laki-laki atau sebanyak 53 orang, dan terdapat 44,8% responden yang berjenis kelamin perempuan atau sebanyak 43 orang. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 53 orang.

b. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Hasil dari klasifikasi responden berdasarkan usia disajikan dalam diagram di bawah ini :



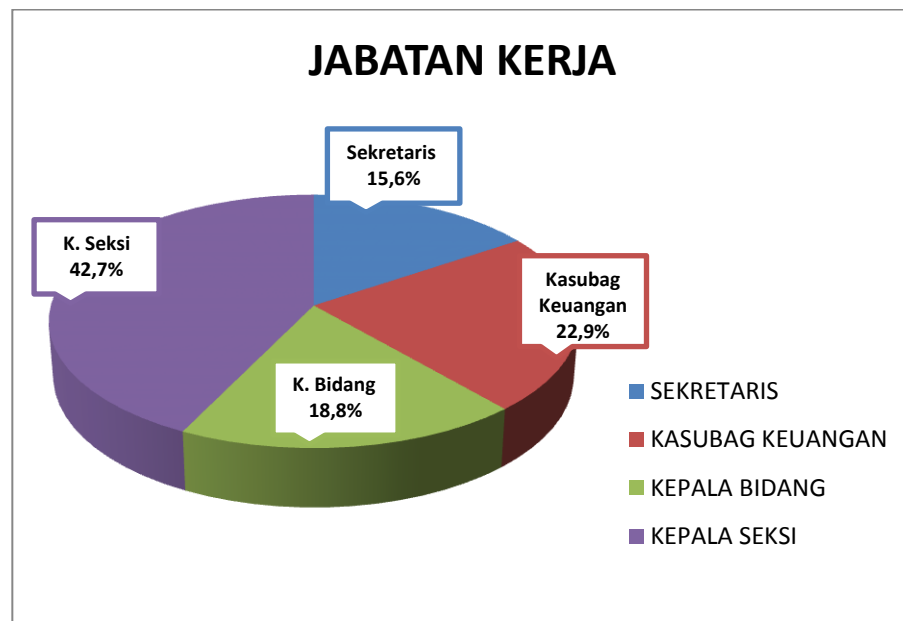
Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Gambar 4.2
Presentase Berdasarkan Usia

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini terdapat 9,4% responden yang berusia 20-35 tahun atau sebanyak 9 orang, responden yang berusia 36-50 sebesar 57,3% atau sebanyak 55 orang, dan responden yang berusia lebih dari 50 tahun sebesar 33,3% atau sebanyak 32 orang. Gambar 4.2 tersebut juga menunjukkan bahwa responden terbanyak berusia 36-50 tahun, yaitu sebanyak 55 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden sedang berada dalam usia produktif dalam menjalankan pekerjaannya.

c. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan

Hasil dari klasifikasi responden berdasarkan jabatan disajikan dalam diagram di bawah ini :



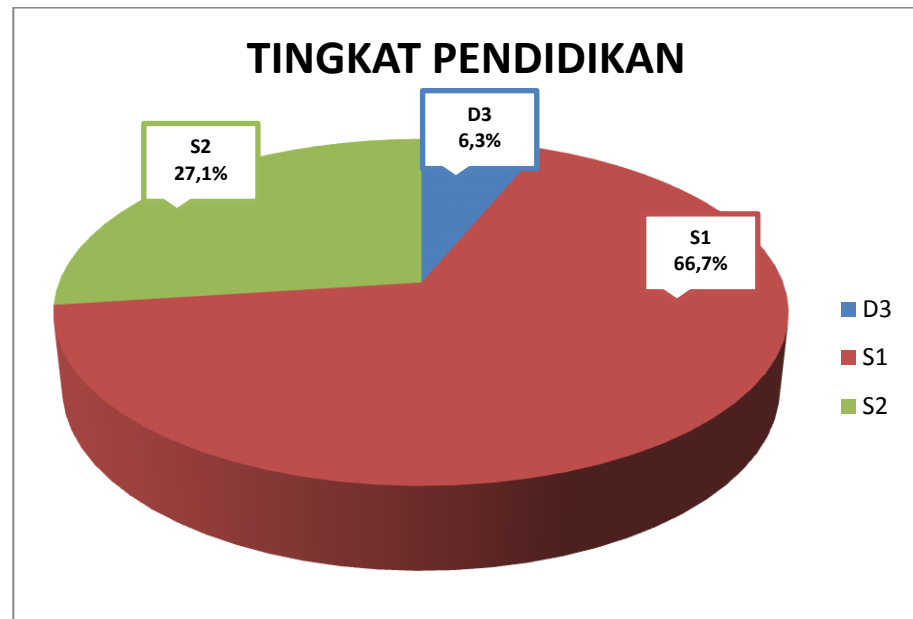
Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Gambar 4.3
Presentase Berdasarkan Jabatan Kerja

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini terdapat responden yang menjabat sebagai sekretaris sebesar 15,6% atau sebanyak 15 orang, responden yang menjabat sebagai kepala sub bagian keuangan sebesar 22,9% atau sebanyak 22 orang, responden yang menjabat sebagai kepala bidang sebesar 18,8% atau sebanyak 18 orang, dan responden yang menjabat sebagai kepala seksi sebesar 42,7% atau sebanyak 41 orang. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah responden yang menjabat sebagai kepala seksi, yaitu sejumlah 41 orang.

d. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Hasil dari klasifikasi responden berdasarkan pendidikan terakhir disajikan dalam diagram di bawah ini :



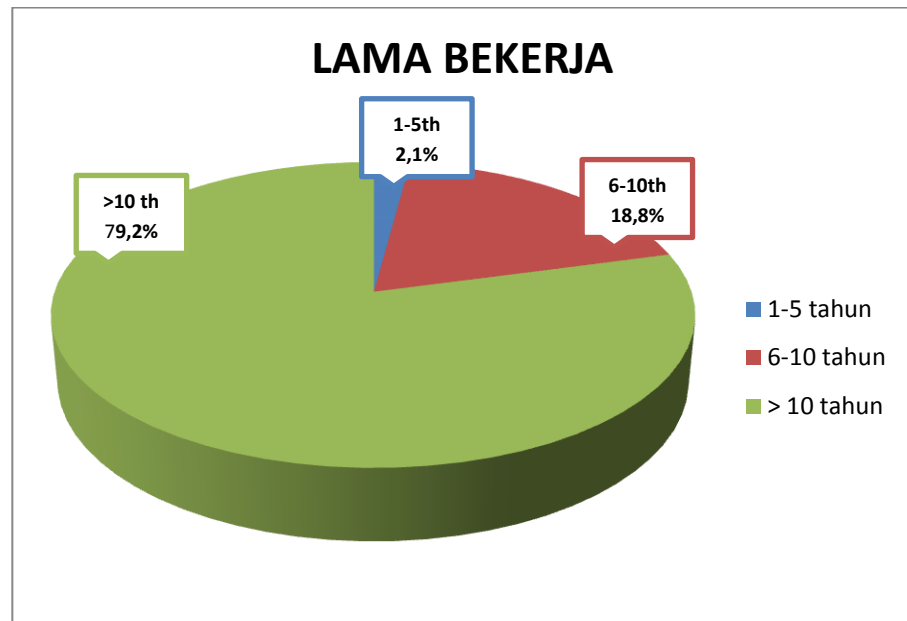
Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Gambar 4.4
Presentase Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa dalam penelitian terdapat responden dengan pendidikan terakhir D3 sebesar 6,3% atau sebanyak 6 orang, responden dengan pendidikan terakhir S1 sebesar 66,7% atau sebanyak 64 orang, dan responden dengan pendidikan terakhir S2 sebesar 27,1% atau sebanyak 26 orang. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak dalam penelitian ini adalah dengan pendidikan terakhir S1, sehingga telah memiliki kompetensi dalam bekerja.

e. Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Hasil dari klasifikasi responden berdasarkan lama bekerja disajikan dalam diagram di bawah ini :



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

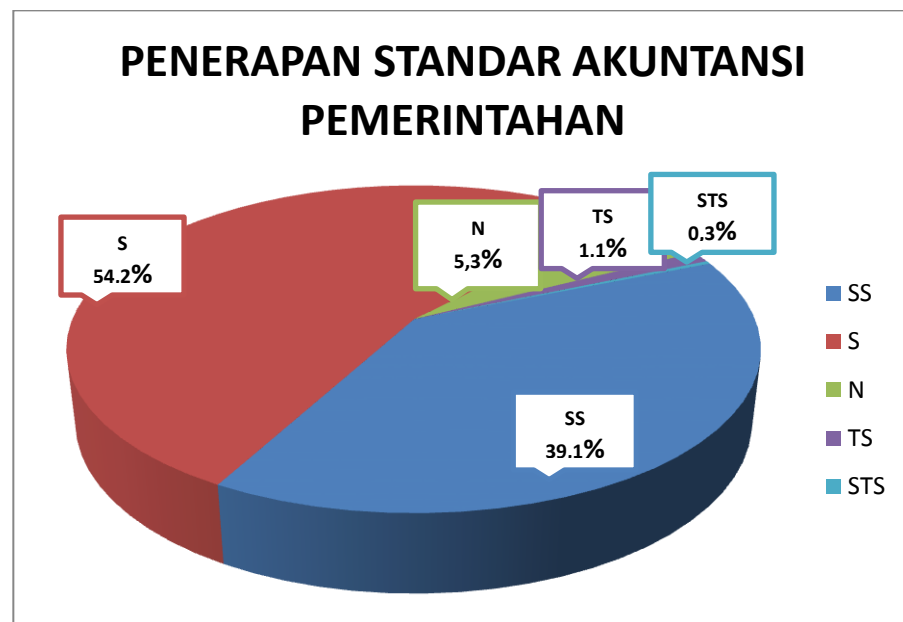
Gambar 4.5
Presentase Berdasarkan Lama Bekerja

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini terdapat 2,1% atau sebanyak 2 responden yang telah bekerja selama 1-5 tahun, terdapat 18,8% atau sebanyak 18 responden yang telah bekerja selama 6-10 tahun, dan terdapat 79,2% atau sebanyak 76 responden yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak dalam penelitian ini adalah responden yang telah bekerja lebih dari 10 tahun, sehingga responden tersebut lebih berpengalaman dalam bekerja.

3. Klasifikasi Jawaban Responden Secara Keseluruhan

a. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Hasil dari presentase jawaban responden pada variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan disajikan dalam gambar diagram di bawah ini :



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Gambar 4.6
Prosentase Jawaban Responden pada Variabel Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan

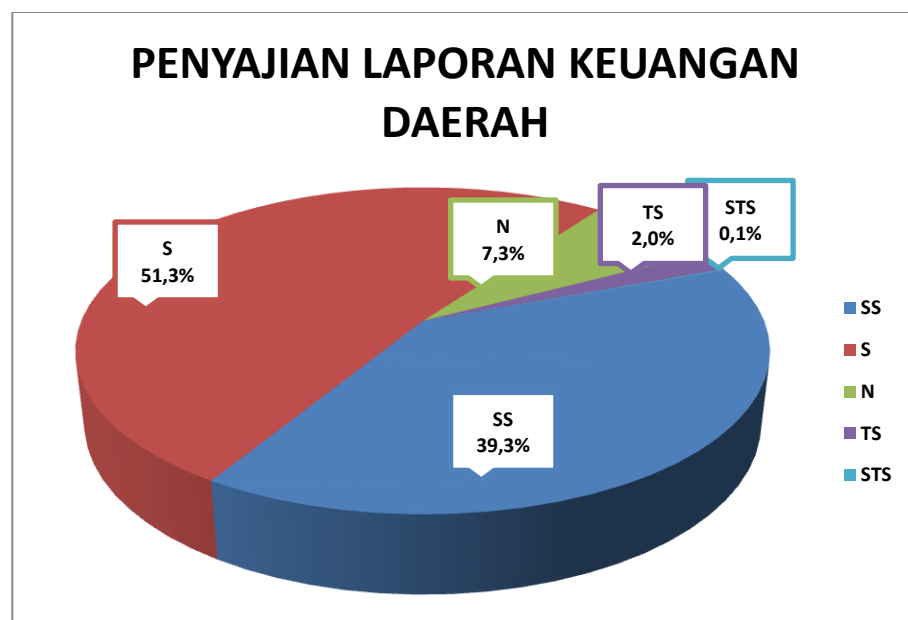
Gambar 4.6 di atas menunjukkan prosentase jawaban responden untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan. Jawaban tersebut menggambarkan bahwa responden setuju telah diterapkannya standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD.

Berdasarkan 14 pertanyaan yang diajukan, jawaban responden paling banyak berada pada jawaban setuju (ss) yaitu sebesar 39,1% dan sangat setuju (s) sebesar 54,2%. Jawaban responden yang

menyatakan netral (n) adalah sebesar 5,3%. Sedangkan jawaban responden yang menyatakan tidak setuju (ts) adalah sebesar 1,1% dan untuk jawaban sangat tidak setuju (sts) sebesar 0,3%. Dengan demikian, maka sebagian besar jawaban responden adalah sangat setuju (ss) sebesar 39,1% dan setuju sebanyak 54,2%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa responden setuju telah diterapkannya standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD dengan baik.

b. Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Hasil dari presentase jawaban responden pada variabel penyajian laporan keuangan daerah disajikan dalam gambar diagram di bawah ini :



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

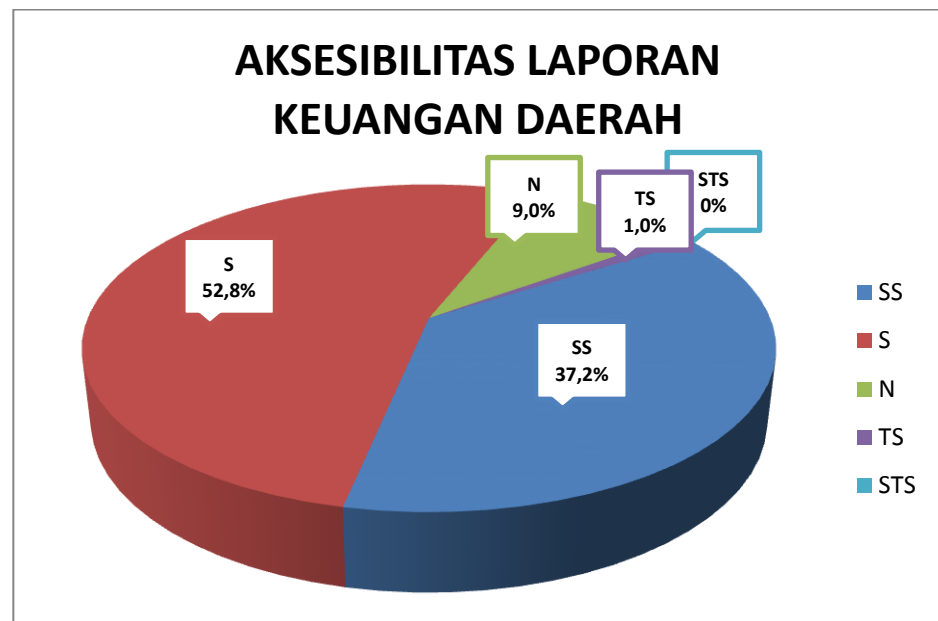
Gambar 4.7
Presentase Jawaban Responden pada Variabel Penyajian
Laporan Keuangan Daerah

Gambar 4.7 di atas menunjukkan presentase jawaban responden untuk variabel penyajian laporan keuangan daerah. Jawaban tersebut menggambarkan bahwa responden setuju telah dilakukannya penyajian laporan keuangan SKPD.

Berdasarkan 8 pertanyaan yang diajukan, jawaban responden yang menyatakan setuju (ss) adalah sebesar 39,3% dan sangat setuju (s) sebesar 51,3%. Jawaban responden yang menyatakan netral (n) adalah sebesar 7,3%. Sedangkan jawaban responden yang menyatakan tidak setuju (ts) adalah sebesar 2,0% dan untuk jawaban sangat tidak setuju (sts) sebesar 0,1%. Dengan demikian, maka sebagian besar jawaban responden adalah sangat setuju (ss) sebesar 39,3% dan setuju sebanyak 51,3%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa responden setuju jika SKPD telah melakukan penyajian laporan keuangan dengan baik.

c. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil dari presentase jawaban responden pada variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah disajikan dalam gambar diagram di bawah ini :



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Gambar 4.8
Presentase Jawaban Responden pada Variabel Aksesibilitas
Laporan Keuangan Daerah

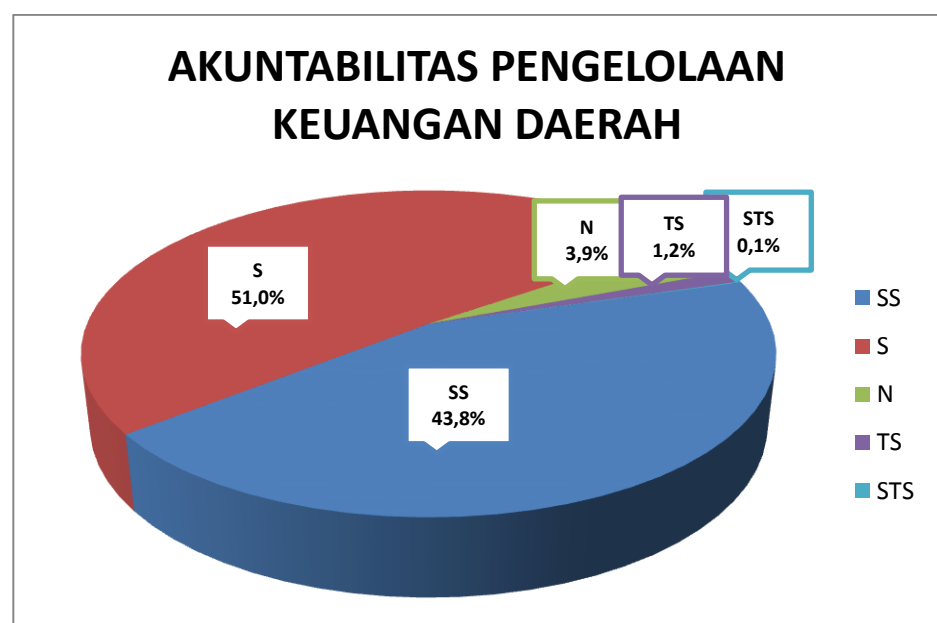
Gambar 4.8 di atas menunjukkan presentase jawaban responden untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah. Jawaban tersebut menggambarkan bahwa responden setuju SKPD telah memberikan kemudahan akses laporan keuangan.

Berdasarkan 3 pertanyaan yang diajukan, jawaban responden yang menyatakan setuju (ss) adalah sebesar 37,2% dan sangat setuju (s) sebesar 52,8%. Jawaban responden yang menyatakan netral (n) adalah sebesar 9,0%. Sedangkan jawaban responden yang menyatakan tidak setuju (ts) adalah sebesar 1,0% dan untuk jawaban sangat tidak setuju (sts) sebesar 0%. Dengan demikian, maka sebagian besar jawaban responden adalah sangat setuju (ss) sebesar 37,2% dan setuju

sebanyak 52,8%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa responden setuju jika SKPD telah memberikan kemudahan akses laporan keuangan.

d. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil dari presentase jawaban responden pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam gambar diagram di bawah ini :



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Gambar 4.9
Presentase Jawaban Responden pada Variabel Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah

Gambar 4.8 di atas menunjukkan presentase jawaban responden untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah. Jawaban tersebut menggambarkan bahwa responden setuju SKPD telah melakukan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan 8 pertanyaan yang diajukan, jawaban responden yang menyatakan setuju (ss) adalah sebesar 43,8% dan sangat setuju (s) sebesar 51,0%. Jawaban responden yang menyatakan netral (n) adalah sebesar 3,9%. Sedangkan jawaban responden yang menyatakan tidak setuju (ts) adalah sebesar 1,2% dan untuk jawaban sangat tidak setuju (sts) sebesar 0,1%. Dengan demikian, maka sebagian besar jawaban responden adalah sangat setuju (ss) sebesar 43,8% dan setuju sebanyak 51,0%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa responden setuju jika SKPD telah melakukan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan baik.

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Berikut adalah tabel statistik deskriptif yang menjelaskan deskripsi dari seluruh variabel dalam penelitian ini. Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|--|----|---------|---------|-------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan | 96 | 42 | 70 | 60,30 | 6,219 |
| Penyajian Laporan Keuangan Daerah | 96 | 24 | 40 | 34,22 | 3,790 |
| Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah | 96 | 7 | 15 | 12,78 | 1,706 |
| Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan | 96 | 24 | 40 | 34,97 | 3,404 |
| Valid N (listwise) | 96 | | | | |

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa dalam penelitian terdapat responden sebanyak 96 orang. Nilai minimum yang diperoleh variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah sebesar 42 dan nilai maksimum sebesar 70, dengan nilai rata-rata sebesar 60,30 serta standar deviasi sebesar 6,219. Nilai minimum yang diperoleh variabel penyajian laporan keuangan adalah sebesar 24 dan nilai maksimum sebesar 40, dengan nilai rata-rata sebesar 34,22 serta standar deviasi sebesar 3,790. Nilai minimum yang diperoleh variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah adalah sebesar 7 dan nilai maksimum sebesar 15, dengan nilai rata-rata sebesar 12,78 serta standar deviasi sebesar 1,706. Nilai minimum yang diperoleh variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah

sebesar 24 dan nilai maksimum sebesar 40, dengan nilai rata-rata sebesar 34,97 serta standar deviasi sebesar 3,404.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai KMO yang terdapat dalam tabel KMO anda Bartlett's Test. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *SPSS for windows* versi 15.0. Hasil dari pengujian tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas

| Variabel | Nilai KMO | Standar Validitas | Keterangan |
|----------|-----------|-------------------|--------------|
| SAP | 0,851 | <i>Alpha</i> 0,05 | <i>Valid</i> |
| PLK | 0,801 | <i>Alpha</i> 0,05 | <i>Valid</i> |
| ALK | 0,706 | <i>Alpha</i> 0,05 | <i>Valid</i> |
| APK | 0,772 | <i>Alpha</i> 0,05 | <i>Valid</i> |

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Tabel 4.3 yaitu tabel yang menyajikan hasil uji validitas, menunjukkan bahwa untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, memiliki nilai KMO sebesar $0,851 > \alpha 0,05$, variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki nilai KMO sebesar $0,801 > \alpha 0,05$, variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki nilai KMO sebesar $0,706 > \alpha 0,05$, serta variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai KMO sebesar $0,772 > \alpha 0,5$. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan

bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *valid*.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai *Cronbach's alpha*. Apabila suatu variabel memiliki nilai *Cronbach's alpha* $> 0,70$, maka variabel tersebut dapat dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | <i>Cronbach's Alpha</i> | Standar Reliabel | Keterangan |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| SAP | 0,916 | 0,70 | <i>Reliabel</i> |
| PLK | 0,861 | 0,70 | <i>Reliabel</i> |
| ALK | 0,820 | 0,70 | <i>Reliabel</i> |
| APK | 0,837 | 0,70 | <i>Reliabel</i> |

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Tabel 4.4 yaitu tabel yang menyajikan hasil uji reliabilitas, menunjukkan bahwa untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar $0,916 > 0,70$, variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar $0,861 > 0,70$, variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar $0,820 > 0,70$, serta variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar $0,837 > 0,70$. Dengan demikian, maka dapat

disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *reliabel*.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang termuat di dalam tabel *One Sample Kolmogorov Smirnov-Test*. Hasil dari pengujian tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov-Tes | Nilai Sig | Keterangan |
|--|------------------|----------------------|
| <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i> | 0,364 | Berdistribusi Normal |

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar $0,364 > \alpha 0,05$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat melalui nilai *tolerance* dan juga nilai *VIF*. Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *variance inflation factor* (*VIF*) < 10 , maka dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | Nilai <i>Tolerance</i> | VIF | Keterangan |
|----------|------------------------|-------|---------------------------------|
| SAP | 0,507 | 1,973 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |
| PLK | 0,434 | 2,303 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |
| ALK | 0,630 | 1,587 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,507 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,973 < 10$, variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,434 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,303 < 10$, serta variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,630 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,587 < 10$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser*, yaitu dilakukan dengan meregres uji absolut residual dengan variabel independen yang digunakan. Apabila pengujian menunjukkan hasil $Sig > \alpha 0,05$ maka bebas dari heteroskedastisitas. Hasil dari pengujian tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variabel | Sig | Standar | Keterangan |
|----------|-------|-------------------|-----------------------------------|
| SAP | 0,102 | <i>Alpha</i> 0,05 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| PLK | 0,129 | <i>Alpha</i> 0,05 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| ALK | 0,054 | <i>Alpha</i> 0,05 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai *sig* sebesar 0,102 > *alpha* 0,05, variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki nilai *sig* sebesar 0,129 > *alpha* 0,05, dan variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki nilai *sig* sebesar 0,054 > *alpha* 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Uji Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari regresi berganda dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.8
Ringkasan Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Variabel | Koefisien Regresi | t | Sig | Keterangan |
|-----------|-------------------|-------|-------|------------|
| Konstanta | 6,072 | 2,855 | 0,005 | |
| SAP | 0,308 | 6,685 | 0,000 | Positif |
| PLK | 0,177 | 2,165 | 0,033 | Positif |
| ALK | 0,337 | 2,238 | 0,028 | Positif |

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel pengujian linear berganda di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{APK} = 6,072 + 0,308 \text{ SAP} + 0,177 \text{ PLK} + 0,337 \text{ ALK} + e$$

Persamaan linear tersebut dapat diartikan bahwa :

- a. Konstanta sebesar 6,072 memiliki artian bahwa apabila konstanta (nol) maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan naik sebesar 6,072.
- b. Nilai koefisien regresi standar akuntansi pemerintahan adalah sebesar 0,308, bertanda positif yang memiliki arti bahwa antara standar akuntansi pemerintahan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berbanding lurus. Apabila standar akuntansi pemerintahan ditingkatkan 1 satuan maka dapat menaikkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,308.
- c. Nilai koefisien regresi penyajian laporan keuangan daerah adalah sebesar 0,177, bertanda positif yang memiliki arti bahwa antara penyajian laporan keuangan daerah dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berbanding lurus. Apabila penyajian laporan

keuangan daerah ditingkatkan 1 satuan maka dapat menaikkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,177.

- d. Nilai koefisien regresi aksesibilitas laporan keuangan daerah adalah sebesar 0,337, bertanda positif yang memiliki arti bahwa antara aksesibilitas laporan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berbanding lurus. Apabila aksesibilitas laporan keuangan daerah ditingkatkan 1 satuan maka dapat menaikkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,337.

2. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase variabel independen yaitu variabel standar akuntansi pemerintahan, penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Apabila nilai koefisien determinasi semakin besar, maka akan semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary | Nilai | Keterangan |
|----------------------|--------------|--|
| Ajusted R Square | 0,660 | Variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 66% |

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,660. Hal tersebut menjelaskan bahwa variabel independen yaitu variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah mampu menjelaskan variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 66%, dan sisanya yaitu sebesar $(100\% - 66\% = 34\%)$ dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian.

3. Uji F

Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel-variabel independen, yaitu variabel standar akuntansi pemerintahan, penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah mampu secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil uji F disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji F

| Anova | Nilai | Keterangan |
|--------|-------|---|
| Sig. F | 0,000 | Variabel-variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara simultan |

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa nilai Sig F adalah sebesar $0,000 < \alpha 0,05$. Hal tersebut menjelaskan bahwa variabel-variabel independen yaitu standar akuntansi pemerintahan, penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah mampu secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4. Uji t

Uji t adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Suatu hipotesis memiliki kriteria agar dapat dinyatakan diterima atau ditolak. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Apabila nilai $Sig t < \alpha 0,05$ dan koefisien beta memiliki arah yang sama dengan hipotesis maka hipotesis diterima.
- b. Sebaliknya, apabila nilai $Sig t > \alpha 0,05$ dan koefisien beta memiliki arah yang berbeda dengan hipotesis maka hipotesis ditolak.

Tabel 4.11
Hasil Uji t

| Variabel | Koefisien Regresi | t | Sig | Keterangan |
|-----------|-------------------|-------|-------|------------|
| Konstanta | 6,072 | 2,855 | 0,005 | |
| SAP | 0,308 | 6,685 | 0,000 | Positif |
| PLK | 0,177 | 2,165 | 0,033 | Positif |
| ALK | 0,337 | 2,238 | 0,028 | Positif |

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat diketahui sebagai berikut :

a. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil uji t menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,308 dan nilai *sig t* (0,000) < *alpha* 0,05. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga hipotesis pertama diterima.

b. Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil uji t menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,177 dan nilai *sig t* (0,033) < *alpha* 0,05. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga hipotesis kedua diterima.

c. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil uji t menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,337 dan nilai *sig t* ($0,028$) < *alpha* 0,05. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga hipotesis ketiga diterima.

E. Pembahasan (Interpretasi)

Penelitian ini menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut :

Tabel 4.12
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

| Kode | Hipotesis | Hasil |
|----------------------|---|--------------|
| H₁ | Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | Diterima |
| H₂ | Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | Diterima |
| H₃ | Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | Diterima |

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian yang menunjukkan nilai sig ($0,000$) $< \alpha$ $0,05$, dan bertanda positif. Sehingga memiliki artian bahwa pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan dengan baik dalam menyusun laporan keuangan, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. SKPD Kabupaten telah menerapkan basis akrual dalam pencatatan laporan keuangan, penyajian dengan wajar, laporan keuangan dilaporkan sesuai dengan periode yang ditentukan, serta disajikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna secara lengkap.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan akan menjamin bahwa penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Adhi dan Suhardjo, 2013). Sehingga, adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan akan memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang disusun memiliki kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para pengguna yang membutuhkannya. Adanya informasi yang berguna tersebut akan menunjang terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan serta melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pencapaian akuntabilitas dapat diwujudkan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, SKPD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menerapkan standar akuntansi pemerintah dengan baik dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Meskipun terdapat peralihan dari SAP berbasis kas menuju SAP berbasis akrual, pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan tetap dapat menerapkan SAP dalam menyusun laporan keuangan daerah.

Dengan demikian, maka penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian Zeyn (2011) serta penelitian Ichlas, Basri, dan Arfan (2014) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

2. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian yang menunjukkan nilai *sig* (0,033) < *alpha* 0,05, dan bertanda positif. Artinya, SKPD Kabupaten Kulon Progo telah mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik, di mana SKPD telah mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap, tepat waktu dalam menyelesaikan laporan keuangan, menyajikan informasi dengan jujur, laporan keuangan dapat dibandingkan, laporan keuangan SKPD dapat dijadikan tolok ukur dalam menyusun anggaran tahun berikutnya, informasi keuangan terbebas dari salah saji material, serta informasi laporan keuangan mampu memenuhi kebutuhan penggunaanya.

Menurut Mardiasmo (2009), laporan keuangan sektor publik merupakan salah satu komponen dalam rangka terciptanya akuntabilitas publik. Pemerintah daerah sebagai pihak yang menerima amanah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan melalui laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang baik

merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Sande, 2013). Dengan demikian, menunjukkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan yang dilakukan maka akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fauziah dan Handayani (2017); Hehanussa (2015); serta Subekti, Rizani, dan Novriyandana (2015). Ketiga penelitian tersebut menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian yang menunjukkan nilai sig (0,028) < $alpha$ 0,05, dan bertanda positif. Artinya, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mempublikasikan laporan keuangan dengan terbuka, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi laporan keuangan serta dapat diakses melalui internet.

Sebuah langkah untuk mewujudkan terciptanya akuntabilitas yaitu dengan dilakukannya pemberian informasi keuangan kepada

masyarakat dan pemakai lainnya, dimana informasi tersebut digunakan untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah mengenai segala aktivitas yang dilakukan, tidak hanya mencakup aktivitas finansialnya saja (Mardiasmo, 2009). Masyarakat memiliki hak untuk melakukan akses terhadap laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai sejauh mana pemerintah melakukan pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan demikian, maka pemerintah diharuskan untuk memenuhi hak publik tersebut. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hak publik, sehingga pemerintah harus memberikan informasi yang termuat dalam laporan keuangan kepada publik (masyarakat). Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi keuangan. Akses dapat dilakukan melalui berbagai macam media, misalnya adalah surat kabar, majalah, stasiun televisi, ataupun melalui internet (Hehanussa, 2015). Sehingga, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat apabila Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memberikan kemudahan akses bagi para penggunanya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fauziah dan Handayani (2017); Ichlas, Basri, dan Arfan (2014); Sumiyati (2015); dan Hehanussa (2015) yang menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.